

STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Wahyono S.K.

Perkembangan dunia sekarang dan di masa datang menunjukkan kecenderungan akan semakin pentingnya peranan laut dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang berpusat di kawasan tertentu, yaitu Asia Timur, Eropa Barat dan Amerika Utara, dapat dipastikan akan meningkatkan volume arus barang lewat laut antar ketiga kawasan tersebut dan dari ketiga kawasan tersebut ke bagian-bagian dunia yang lain. Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat dan mulai mengancam daya dukung bumi, menjadikan laut sumber bahan pangan yang semakin besar peranannya dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Di sisi yang lain kemajuan teknologi telah memungkinkan manusia untuk meningkatkan pemanfaatannya atas laut dan dasar laut, yang sulit dilakukan di masa lalu.

Mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan konflik antarnegara di masa datang berkaitan dengan batas laut teritorial, batas zona ekonomi, batas landas kontinen, lalu lintas internasional, perikanan, pelestarian sumber daya alam laut dan perlindungan lingkungan laut, penambangan lepas pantai dan penambangan dasar laut dalam, serta penerapan atas prinsip negara kepulauan, PBB telah mengambil prakarsa besar menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Ketiga, yang berlangsung selama sembilan tahun dari tahun 1973 sampai tahun 1982. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi Hukum Laut yang sekarang ini telah diratifikasi oleh 75 negara.

Indonesia sejak tahun 1957 telah menyatakan dirinya sebagai Negara Kepulauan di mana laut di antara dan di sekeliling pulau-pulaunya menjadi bagian integral dari wilayah daratnya. Prinsip ini pada awalnya dikenal sebagai Azas Nusantara dan baru kemudian disebut sebagai prinsip hukum Negara Kepulauan sesuai ketentuan PBB. Sejak awal sejarahnya bangsa Indonesia telah menjadikan laut sebagai bagian dari kehidupannya yang diekspresikan dalam kata "tanah air" yang menunjukkan lingkungan

Wahyono S.K., Ph.D., Deputi Penelitian dan Pengkajian Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

hidupnya. Bagi bangsa Indo- laut tidak hanya berfungsi se- sumber bahan pangan dan mi- erta sarana penghubung dan pemersatu, tetapi juga sebagai ng halaman dan sekaligus ben- ertahanan.

iran Indonesia selain kaya de- umber daya alam, baik hayati n nonhayati, juga sangat stra- arena terletak di antara dua ra, yaitu Samudera Pasifik dan ra India, sehingga merupakan n yang penting dalam hubung- ra kawasan Eropa Barat de- sia Timur dan juga dengan barat Amerika Utara. Di masa perairan itu akan menjadi se- penting, dengan meningkatnya i lintas barang ke Eropa Barat ia Timur dan pantai barat a Utara dan sebaliknya. Di g itu perairan Indonesia juga di antara dua benua, yaitu Asia dan benua Australia, se- s barang dari dan ke kedua tersebut, dari benua Asia yang uduk sangat padat diperkira- an terus mengalir perahu s perairan Indonesia dengan benua Australia yang relatif Kedua kemungkinan lalu lin- itu akan membuat perairan ia sebagai jalan silang dunia an terus bersifat strategis da- ungan antarnegara.

a umum, laut di mana pun an sumber daya yang sangat akan bagi kemakmuran dan a negara, oleh karena itu nega-

ra-negara besar berusaha untuk me- nguasainya. Penguasaan atas laut dengan membangun kekuatan laut (*sea power*) yang kuat akan mempe- ngaruhi perjalanan sejarah suatu nega- ra.

Benua Nusantara

Sebagai suatu bangsa yang hidup di suatu kepulauan yang sangat luas, bangsa Indonesia senantiasa mendam- bakan keutuhan bangsa dan wilayah- nya, agar terjamin kelangsungan hi- dupnya. Dari berabad-abad sejarah kehidupan bangsa Indonesia telah tumbuh nilai-nilai luhur tentang ke- imanan, persatuan dan kebersamaan, yang kemudian mengristal sebagai Pancasila dan selanjutnya membuah- kan Doktrin Wawasan Nusantara. Dalam implementasinya Doktrin Wa- wasan Nusantara ditopang oleh Azas Nusantara.

Bangsa Indonesia telah menempuh perjuangan yang panjang untuk me- ngukuhkan Azas Nusantara dalam fora internasional, untuk mendapat- kan pengakuan bangsa-bangsa ter- hadap bangun wilayahnya yang khas kepulauan, agar terjamin keselamatan bangsa dan negara Indonesia, kemer- dekaan dan kedaulatannya. Perjuang- an itu akhirnya membuahkan peng- akuan dunia internasional terhadap prinsip hukum Negara Kepulauan se- bagaimana tercantum dalam Konven- si PBB Tentang Hukum Laut (KHL) 1982.

Saat ini telah 75 negara atau mung-

kin lebih yang meratifikasi KHL 1982 sehingga sejak bulan November 1994 telah berlaku sebagai hukum positif. KHL 1982 seharusnya dipatuhi oleh semua negara di dunia, namun demikian belum semua negara besar memberikan persetujuan mereka, bah- kan dengan meningkatnya peranan laut dalam kehidupan dunia dewasa ini dan di masa datang, ada kecende- rungan negara-negara besar itu menuntut kembali kebebasan di laut, yang dapat membahayakan eksisten- si prinsip hukum Negara Kepulauan.

Sesungguhnya KHL 1982 sejak awal sudah disepakati oleh peserta konferensi sebagai satu paket yang menyeluruh yang menjamin keseim- bangan kepentingan antara negara- negara besar dengan negara-negara pantai yang umumnya negara-nega- ra yang sedang berkembang. Dalam paket itu antara lain termasuk peng- akuan terhadap prinsip hukum Nega- ra Kepulauan dengan kedaulatan atas perairan pedalaman dan perairan kepulauan, sepanjang disediakan beberapa alur laut yang terbuka bagi kapal-kapal negara lain untuk melin- tas dari zona ekonomi atau samudera yang satu ke zona ekonomi atau sa- modera yang lain. Saat ini negara- negara besar menuntut kebebasan yang lebih luas melalui perairan ke- pulauan.

KHL 1982 memberikan hak kepa- da negara yang wilayahnya berupa kepulauan untuk menerapkan prinsip hukum Negara Kepulauan, di mana laut di antara dan di sekeliling pulau-

pulaunya merupakan bagian yang in- tegral demikian pula seluruh udara di atasnya. Negara Kepulauan itu diberi pula hak untuk menarik garis pangkal lurus (*straight base line*) dari titik-titik terluar pulau-pulaunya dan menya- takan laut di bagian dalam garis-garis pangkal lurus itu sebagai perairan kepulauan (*archipelagic waters*) dengan status kedaulatan yang sama seperti kedaulatannya atas wilayah darat, dengan mengakomodasikan kepen- tingan tertentu negara lain. Beberapa bagian dari celah-celah teluk dan muara sungai di bagian dalam perair- an kepulauan merupakan perairan pedalaman (*internal waters*).

Dari garis-garis pangkal lurus itu Negara Kepulauan juga berhak untuk menarik lajur laut selebar 12 mil se- bagai laut teritorial (*territorial sea*) dan selebar 200 mil sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE), termasuk masing- masing bagian berikut udara di atas- nya. Apabila status hukum laut teri- torial adalah hak kedaulatan (*so- vereignty*), maka status hukum ZEE adalah hak berdaulat (*sovereign rights*) atas kekayaan alamnya. Di samping itu dari garis-garis pangkal itu juga ada hak berdaulat atas kekayaan alam di lapisan-lapisan tanah yang me- rupakan lanjutan wilayah darat, yang menjorok ke laut dari garis pantai sam- pai batas tepi benua (*continental mar- gin*) dan disebut landas kontinen (*con- tinental shelf*). KHL 1982 juga memberi- kan hak kepada negara pantai untuk mengatur hal-hal tertentu di laut be- bas dekat ZEE yang berkaitan dengan

ran wilayahnya. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik terdapat ribuan pulau (*a body of dotted by thousands of islands*) yang mengelilingi Kepulauan Indonesia merupakan benua air yang luar biasa besar. Benua Bentang Kepulauan Indonesia membentang dari Sabang sampai ke Merauke kira-kira sama dengan jarak dari San Francisco sampai ke Washington DC, atau London sampai ke Istanbul. Benua Kepulauan Indonesia itu menyempit di bagian tengah Benua Amerika Utara dan Benua Eropa. Tidak salah apabila kemudian ada yang beranggapan bahwa Kepulauan Indonesia juga merupakan sebuah benua, tetapi karena terdiri atas lebih banyak air dari daratan maka disebut benua maritim. Sebagai benua maritim yang batas-batasnya adalah batas-batas laut teritorial, ZEE dan landas kontinen sesuai ketentuan KHL 1982 dan perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara tetangga, penampilan Kepulauan Indonesia menjadi lebih utuh secara geografis, ekologis dan klimatologis. Kepulauan Indonesia memang merupakan satu kesatuan hutan tropis dengan iklim tropis di seluruh wilayahnya yang menjadi salah satu paru dunia yang penting sehingga mempunyai dampak global. Mengembangkan Kepulauan Indonesia menjadi satu benua yang utuh memerlukan konseptualisasi pembangunan dan pertahanannya, karena peranan obyeknya menjadi lebih menyeluruh dan lebih terpadu.

Benua maritim bukanlah suatu konsep hukum atau konsep politik yang berkonotasi keluasan atau perluasan wilayah, melainkan suatu konsep pikiran atau imajinasi tentang bangun geografis suatu wilayah, yang menjadikan suatu wilayah kepulauan yang terserak satu kesatuan yang utuh, yang tidak hanya mencakup aspek kewilayahannya tetapi juga sumber daya alam yang menjadi hak kedaulatannya di ZEE dan landas kontinen serta udara di atasnya. Penggambaran sebagai benua maritim akan menimbulkan dampak psikologis yang dapat menimbulkan dorongan untuk mencintai laut.

Benua maritim Indonesia atau barangkali lebih tepat disebut Benua Nusantara dapat digambarkan sebagai bagian dari sistem planet bumi yang menjadi wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas laut beserta pulau-pulau di dalamnya, berupa perairan pedalaman dan perairan kepulauan dengan ribuan pulau di dalamnya dan laut teritorial di sekelilingnya serta udara di atasnya yang keseluruhannya merupakan wilayah kedaulatannya, ditambah ZEE dan landas kontinen serta udara di atasnya dengan hak berdaulat atas kekayaan alamnya, yang ke semuanya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh.

Bangun alam sebuah kepulauan besar dengan dukungan KHL 1982 melahirkan konsep pikiran atau imajinasi tentang benua maritim yang

memudahkan pengembangan konsepsi pembangunan dan sekaligus konsepsi pertahanan keamanannya yang menyeluruh, terpadu, adil, dan merata. Apabila benua Nusantara merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan keutuhan dan keselamatannya, maka bangun obyeknya akan menjadi lebih jelas dan karenanya akan demikian pula sistem pertahanan yang harus dikembangkan, termasuk berapa besar serta ke arah mana kapal-kapal angkatan laut harus digelar.

Medan Perang Laut dan Tugas Angkatan Laut

Laut selain berfungsi sebagai media transportasi dan media pemersatu, juga berfungsi sebagai media perang di laut. Medan perang di laut sangat spesifik disebabkan sifat-sifat alamnya yang khas. Air laut berhubungan satu dengan yang lain, tidak mempunyai batas alam dan tidak mungkin dibuatkan pagar pembatas, sehingga di laut tidak dikenal adanya pembagian medan-medan pertahanan berlapis karena seluruh laut bebas di muka bumi merupakan medan perang bagi pihak-pihak yang berperang.

Dalam Perang Dunia I misalnya dikenal pertempuran di Kepulauan Falkland tanggal 8 Desember 1914 di mana armada perang Jerman yang antara lain terdiri atas kapal penempur (*battle ship*) Scharnhorst dan Gneisenau diburu oleh armada perang

Inggris sejak dari Samudera Pasifik sampai ke ujung selatan Amerika Selatan dan akhirnya berhasil ditenggelamkan di sekitar Kepulauan Falkland. Masih dalam Perang Dunia I, Jerman menugaskan kapal penjelajah (*cruiser*) Emden untuk memotong garis perhubungan laut Inggris di Samudera India. Selama bertugas di Samudera India kapal penjelajah Emden pernah singgah di Teluk Bayur untuk perbaikan dan mengisi persediaan sebelum akhirnya ditenggelamkan di Kepulauan Kokos.

Mengawali Perang Dunia II telah terjadi kejar-kejaran antara armada kapal perang Jerman dengan Inggris sampai ke ujung selatan Amerika Selatan. Dalam pertempuran di Sungai Plata tanggal 13 Desember 1939 kapal penempur Graf Von Spee akhirnya berhasil ditenggelamkan setelah terjadi perburuan yang seru. Dalam Perang Dunia II juga terkenal peranan kapal-kapal selam Jerman yang menghadang semua kapal perang dan kapal niaga Sekutu di semua laut di muka bumi. Contoh-contoh pertempuran laut dari Perang Dunia I dan II tersebut mencakup medan perangnya mencakup hampir seluruh laut di muka bumi.

Perang di laut memang tidak mengenal batas-batas wilayah pihak-pihak yang berperang. Perang di laut tidak mengenal adanya daerah pertempuran (*battle fronts*), atau garis pertempuran (*front lines*) yang memisahkan antara pihak yang menyerang dengan pihak yang bertahan, juga

ak mengenal adanya titik-titik per-
anian yang diperkuat (*strongholds*),
erti yang terjadi dalam perang di
at. Seluruh laut dan samudera me-
akan padang perburuan, baik bagi
g menyerang maupun bagi yang
tahan.

Permukaan laut yang datar dan ter-
ta menjadikan pertempuran di laut
gat ditentukan oleh pihak pengam-
inisiatif. Kedua pihak yang me-
rang maupun yang bertahan, ma-
g-masing berusaha untuk menge-
musuhnya dan menghancurkan-
terlebih dulu. Tidak selamanya
ak penyerang yang memburu pi-
yang bertahan, karena tidak
ng terjadi justru pihak penyerang
g diburu dan ditenggelamkan
ebih dulu oleh pihak yang se-
susnya bertahan, seperti armada
ang Perancis yang dipimpin
te de Tourville yang semula se-
ni penyerang akhirnya diburu dan
ncurkan armada perang Inggris di
ah Lord Torrington pada tahun
1791).

ertempuran di laut bersifat ofen-
an global. Oleh karena itu angkat-
aut negara mana pun, besar atau
l, untuk mempertahankan laut
ulatan dan yurisdiksinya memer-
n kapal perang yang mampu me-
ar dan menenggelamkan musuh-
di bagian laut mana pun di muka
i. Demikian pula pendidikan pra-
laut mempunyai inti yang bersi-
niversal, yaitu mampu bertempur
ut dan samudera mana pun.
alam perang di laut tugas pokok

angkatan laut secara universal ada
tiga, yaitu (1) menegakkan pengu-
asaan atas laut tertentu (*command of the
sea*), (2) mencegah musuh mengua-
sai laut tertentu (*keeping the sea in
dispute*), dan (3) memanfaatkan pe-
nguasaan atas laut untuk kepentingan
sendiri (*exercising command of the sea*).
Tugas pokok pertama biasanya dica-
pai melalui serangkaian pertempuran
laut yang menentukan yang berakhir
dengan hancurnya armada perang
musuh, atau dapat juga dicapai mela-
lui blokade pangkalan-pangkalan atau
pelabuhan-pelabuhan laut utama
musuh.

Tugas pokok kedua dicapai mela-
lui pemecahan konsentrasi armada
perang musuh ke berbagai jurusan,
sehingga bagian-bagiannya itu mudah
dihancurkan oleh satuan-satuan kapal
perang sendiri yang terus bergerak di
laut dari satu tempat ke tempat yang
lain dan melakukan penyerangan-
penyerangan terhadap satuan-satuan
kapal perang musuh yang terpisah
dari induknya (*fleet in being*).

Tugas pokok ketiga dilaksanakan
setelah dicapai penguasaan atas laut
oleh armada perang sendiri, dengan
tujuan untuk mencegah atau meng-
gagalkan usaha invasi atau penetrasi
musuh, mempertahankan perhubung-
an laut sendiri dan menghancurkan
perhubungan laut musuh, menggagal-
kan ekspedisi militer musuh dan
melindungi proyeksi kekuatan sendi-
ri ke daratan musuh.

Tugas pokok armada perang ada-
lah untuk memburu dan menghancur-

kan (*to seek out and destroy*) armada
perang musuh, baik dalam perang
ofensif maupun dalam perang defen-
sif. Di masa damai gelar kapal perang
di laut tertentu atau berkunjung dan
mengadakan latihan bersama dengan
kapal perang negara lain, dilaksana-
kan dalam rangka tugas politik yang
dikenal sebagai penghadiran kekuatan
di laut (*naval presence*). Penghadiran
kekuatan di laut adalah dalam rang-
ka mencapai kepentingan nasional ter-
tentu, menjaga persahabatan dan sta-
bilitas keamanan regional.

Penggunaan kapal perang untuk
tujuan diplomasi sudah menjadi bagi-
an yang universal dan alamiah dari
tugas pokoknya. Yang sangat dike-
nal adalah ketika Komodor Matthew
Calbraith Perry yang membawa se-
jumlah kapal perang berlabuh di
Teluk Tokyo pada tanggal 8 Juli 1853
dengan membawa surat dari Presiden
Amerika untuk Kaisar Jepang yang
menuntut agar Jepang membuka iso-
lasi dirinya. Kehadiran Komodor Per-
ry telah mengubah perjalanan sejarah
Jepang.

Penggunaan kekuatan laut untuk
tujuan politik di masa perang dingin
yang lalu telah mengembangkan
sebuah teori baru yang bertolak dari
tradisi penghadiran kekuatan di laut
yang diberi nama teori suasi (*the theory
of suasion*), yang intinya adalah pen-
jabaran penghadiran kekuatan di laut
dalam moda-moda tertentu sehingga
memudahkan evaluasinya. Teori suasi
dalam penggunaan kapal perang di
masa damai untuk tujuan-tujuan

politik dapat dibedakan dalam dua
kategori, yaitu yang bersifat laten dan
yang bersifat aktif. Kedua moda itu
digelar untuk mendapatkan sikap
politik tertentu dari negara sasaran.
Penggunaan kapal perang untuk
tujuan politik di masa datang akan
semakin penting.

Pertahanan Laut

Pertempuran di laut (*battle at sea*)
sebagai unsur kegiatan yang menen-
tukan dalam perang laut (*war at sea*),
pada umumnya berlangsung sangat
singkat dalam bilangan menit saja.
Dalam pertempuran di Midway mi-
salnya, yang merupakan titik balik
dalam Perang Dunia II, kontak senja-
ta (pesawat terbang) yang menentu-
kan hanya berlangsung lima menit
meskipun melibatkan 6 kapal induk
dan 80 kapal pendamping di pihak
Jepang dan 3 kapal induk dan 25 ka-
pal pendamping di pihak Amerika.

Meskipun pertempuran di laut
hanya berlangsung beberapa menit,
namun persiapan untuk menghadapi
pertempuran di laut itu memerlukan
waktu yang sangat panjang, antara 10
sampai 20 tahun. Pembuatan disain
kapal perang sampai uji coba model-
nya di laboratorium kelautan mema-
kan waktu 2 sampai 3 tahun, selan-
jutnya pembuatan kapal perang itu
kemudian dengan peralatan dan per-
senjataannya memerlukan waktu 3
sampai 5 tahun. Sedangkan pelatihan
anak buahnya dari tahap pengenalan
peralatan kapal sampai tahap mampu

ngendalikan kapal itu untuk berla-
r dan bertempur tidak cukup hanya
u tahun.

Apalagi kalau harus dimulai dari
ndidik para perwiranya. Pendidik-
perwira memakan waktu 3 sampai
ahun, selanjutnya diperlukan wak-
antara 10 sampai 15 tahun untuk
latih seorang perwira muda berpo-
sisi menjadi seorang komandan ka-
perang yang dapat diandalkan
am segala cuaca di laut. Sedangkan
uk memenangkan perang di laut
erlukan seorang perwira tinggi
g arif dan berpengalaman dalam
erapa pertempuran di laut. Untuk
diperlukan waktu paling sedikit 20
un.

Sementara itu agar mampu melak-
akan tugasnya dalam waktu yang
entukan kapal perang di laut me-
lukan pangkalan dan dukungan
stik yang tidak sedikit, baik un-
anak buahnya, persenjataannya
upun kapal itu sendiri. Diperlu-
suatu jaringan sistem logistik yang
, yang disebar di beberapa lokasi
egis, yang sekaligus membentuk
at-pusat industri dan jasa kelautan.
agai pembangunan kapal perang
a pembangunan jaringan sistem
stik, yang meliputi sarana labuh,
gudangan, perbengkelan dan pe-
atan personil, selain memerlukan
ncanaan yang seksama juga me-
lukan waktu yang cukup lama.
angunan jaringan sistem logistik
ulai mendahului pembuatan kapal
ng.

Kesiapan kapal perang selain harus
didukung oleh anak buah kapal yang
terdidik dan terlatih, juga memerlukan
dukungan tradisi rakyatnya yang cin-
ta laut. Membangun tradisi kebahari-
an jelas memerlukan waktu berpuluh
tahun. Faktor waktu, baik untuk mem-
buat kapal perang, menyiapkan anak
buah maupun untuk membangun jar-
ingan sistem logistik dan tradisi baha-
ri, sangat menentukan dalam pem-
angunan angkatan laut, sehingga
harus dimulai sedini mungkin tanpa
ditunda-tunda.

Pembangunan sistem pertahanan
laut, yang secara pokok meliputi pem-
buatan kapal, pembangunan pangkal-
an dan jaringan sistem logistik dan
penyiapan anak buahnya, termas-
uk membangun tradisi bahari rakyat-
nya, merupakan suatu upaya nasio-
nal terpadu yang melibatkan dan menge-
rahkan seluruh potensi dan kekuatan
nasional. Semua itu memerlukan du-
kungan sumber dana dan waktu yang
cukup, sehingga harus dimulai secara
dini dengan perencanaan jangka pan-
jang yang mantap. Pembangunan
sistem pertahanan laut tidak dapat
diselesaikan oleh satu instansi, atau
banyak instansi tanpa koordinasi. Se-
muanya harus bekerja secara sinergi
sehingga merupakan suatu upaya na-
sional terpadu. Pembangunan sistem
pertahanan laut bagi Negara Kepu-
lauan merupakan tanggung jawab se-
luruh instansi pemerintah dan se-
genap rakyat.

Kekuatan Laut sebagai Elemen Ketahanan Nasional

Sistem pertahanan laut perlu di-
dukung oleh kekuatan laut (*sea po-
wer*) yang memadai. Kekuatan laut
tidak berarti hanya armada kapal pe-
rang, tetapi juga mencakup armada
kapal niaga, pelabuhan, industri dan
tenaga kerja. Inti kekuatan laut se-
ungguhnya adalah perdagangan le-
wat laut baik ke luar negeri maupun
antarpulau bagi Negara Kepulauan.
Kekuatan laut ditinjau dari sudut
ekonomi, terdiri atas tiga unsur uta-
ma, yaitu produksi, (pertanian, per-
industrian dan pertambangan), pelay-
aran (*shipping*) dan pasar (*markets*)
untuk menjual produksi.

Perdagangan adalah kekuatan dan
sekali-gus mesin penggerak ekonomi
negara. Kekuatan ekonomi adalah
juga kekuatan pertahanan, termasuk
pertahanan di laut. Kekuatan laut
oleh karena itu tidak berarti hanya
kekuatan armada kapal perang, teta-
pi juga kekuatan produksi. Kekuatan
laut secara luas harus diartikan se-
bagai kemampuan untuk mendaya-
gunakan laut bagi pembangunan
negara.

Kekuatan laut dalam arti luas, ter-
utama bagi Negara Kepulauan, adalah
inti kekuatan nasional. Kekuatan na-
sional itu sendiri adalah suatu kekuat-
an yang sangat kompleks, yang meru-
pakan paduan bermacam unsur
kekuatan bangsa dan negara, yang
wujudnya adalah keuletan, ketang-
gahan dan kemampuan bangsa dan

negara untuk menjamin kepentingan
nasionalnya dan menanggulangi se-
mula ancaman yang membahayakan
kelangsungan hidupnya. Dalam tiap
unsur kekuatan nasional bagi Negara
Kepulauan harus ada muatan kelaut-
annya.

Unsur-unsur kekuatan nasional
(*national power*) sangat bervariasi se-
suai model yang dikembangkan,
maka dapat berupa komposisi unsur-
unsur demografi, geografi, ekonomi,
sejarah, organisasi pemerintahan dan
militer atau dapat pula berupa kom-
posisi unsur-unsur geografi, kekayaan
alam, kapasitas industri, militer, pen-
duduk, karakter nasional, moral na-
sional, karakter diplomasi dan peme-
rintahan. Sedangkan untuk kekuatan
laut tidak semua negara dapat mem-
bangunnya, karena pertama-tama
negara itu harus berbatasan dengan
laut dan mempunyai akses ke laut.
Unsur-unsur kekuatan laut pada
dasarnya sama dengan unsur-unsur
kekuatan nasional, hanya dikaitkan
dengan laut, yaitu posisi geografi, ben-
tuk fisik wilayah, luas wilayah (pan-
jang garis pantai), jumlah penduduk,
karakter penduduk dan karakter pe-
merintah.

Konsepsi kekuatan nasional bang-
sa Indonesia disebut ketahanan na-
sional (*national resilience*), yang aktu-
alisasinya adalah keuletan, ketang-
gahan dan kemampuan untuk meng-
hadapi tantangan dan menanggulangi
ancaman. Meskipun unsur-unsur ke-
tahan nasional hampir sama de-
ngan unsur-unsur kekuatan nasional,

itu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, tetapi dasar konsepsinya berbeda. Kekuatan nasional umumnya bertolak dari konsepsi sebagai alat pemaksaan kekerasan, sedangkan ketahanan nasional bertolak dari konsep yang menghindari penggunaan kekerasan dan mengusahakan penyelesaian konflik dengan cara damai.

Empat Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

Sebagai sebuah konsepsi pikiran Ketahanan Nasional mengandung dalam dirinya empat fungsi sekaligus. Pertama, berfungsi sebagai kondisi yang menunjukkan tingkat kekuatan bangsa dan negara yang aktualisasinya berupa keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk menghadapi

Unsur-unsur kekuatan nasional

| Konsepsi Ketahanan Nasional | Frederick H. Hartmann | Hans J. Morgenthau | Alfred T. Mahan |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Geografi | Geografi | Geografi | Posisi Geografi |
| Demografi | Demografi | Penduduk | Jumlah Penduduk |
| Kekayaan Alam | - | Kekayaan alam | - |
| Ideologi | - | - | - |
| Politik | Pemerintah | Pemerintah | Karakter Pemerintah |
| Ekonomi | Ekonomi | Industri | - |
| Sosbud | Sejarah | Karakter & Moral | Karakter Penduduk |
| Hankam | Militer | Militer | - |

Apabila keempat model komposisi unsur-unsur kekuatan nasional itu disandingkan, maka dapat diamati bahwa unsur-unsur geografi, penduduk dan pemerintah sangat dominan (lihat matriks). Untuk membangun kekuatan laut maka posisi geografi, jumlah dan karakter penduduk dan karakter pemerintah secara politik dan ekonomi harus mendukung program pembangunan tersebut.

tantangan dan ancaman. Kedua, berfungsi sebagai doktrin yang menjadi pegangan bangsa dan negara dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, berfungsi sebagai metoda untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang kompleks dengan pendekatan multi-

disiplin atau delapan aspek ketahanan nasional. Keempat, berfungsi sebagai kekuatan politik dan pertahanan keamanan untuk menjamin kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan nasional sebagai kekuatan nasional diwujudkan melalui interaksi unsur-unsur kekuatan nasional, yaitu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, yang saling dukung dan saling isi sehingga membentuk kekuatan yang bulat, menyeluruh, sistemik dan terpadu.

Pikiran pokok yang menjadi inti konsepsi Ketahanan Nasional adalah mewujudkan kekuatan nasional yang aktualisasinya berupa keuletan, ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara dalam rangka memperkokoh posisi kekuatan (*power position*) negara di lingkungan pergaulan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Ketahanan nasional menciptakan dan memelihara stabilitas nasional, di samping menumbuhkan kemampuan yang dapat membangun kekuatan nasional. Posisi kekuatan negara dalam lingkungan pergaulan dunia ditingkatkan melalui upaya-upaya diplomasi untuk mempererat persahabatan, saling pengertian, kerjasama, dan jika ada konflik diselesaikan dengan cara-cara damai dengan menjaga keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan antar-negara.

Aktualisasi konsepsi Ketahanan

Nasional mempunyai dua arah, yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam, konsepsi Ketahanan Nasional menciptakan keuletan, ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara dalam satu tatanan sistem nasional yang menyeluruh dan terpadu. Seluruh kehidupan bangsa dan negara tertata dalam sebuah sistem nasional, yang merupakan satu rangkaian sistem empat fungsi pokok penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya dan sistem pertahanan keamanan yang saling berkait.

Setiap sistem tersebut menghasilkan keluaran yang mendukung terwujudnya cita-cita perjuangan bangsa dan tujuan nasional, di samping keluaran yang akan menjadi masukan bagi ketiga sistem yang lain. Dengan demikian keempat sistem itu merupakan satu rangkaian sistem yang bulat, yang saling mengisi dan saling mendukung. Oleh karena itu pula keserasian di antara keempat sistem itu sangat penting, karena kelemahan atau penyimpangan di satu sistem akan mempengaruhi keluaran sistem yang lain, sehingga keluaran seluruh sistem sebagai sistem nasional juga akan terganggu.

Ketahanan nasional adalah hasil akhir proses terpadu sistem nasional (Dephankam, 1988), sedangkan sistem pertahanan keamanan Indonesia yang bermodal ketahanan nasional, dijiwai pertahanan keamanan rakyat semesta. Ada kaitan erat antara sistem na-

nional dengan sistem hankamnas.

Ke luar, konsepsi Ketahanan Nasional mengupayakan terwujudnya ketahanan regional kawasan Asia Tenggara sebagai lini dalam, serta stabilitas kawasan Samudera Pasifik dan kawasan Samudera India sebagai lini luar. Ketiga kawasan itu, yaitu Asia Tenggara, Samudera Pasifik dan Samudera India merupakan kawasan-kawasan kepentingan utama Indonesia, karena secara geopolitik merupakan sabuk pengaman (*safety belt*) berlapis, yaitu sabuk pengaman dalam dan sabuk pengaman luar. Kedua sabuk pengaman itu akan dapat menjadi kawasan penyangga dalam arti politik, ekonomi, sosial budaya dan mungkin juga pertahanan keamanan, baik untuk memproyeksikan kepentingan nasional Indonesia ke luar, maupun untuk menahan tekanan luar terhadap Indonesia. Sabuk-sabuk pengaman itu diperlukan untuk melindungi terselenggaranya sistem pertahanan keamanan berlapis atau mendalam (*defense system in depth*) dengan mewujudkan stabilitas kawasan regional berlapis atau mendalam (*regional stability in depth*) dengan Indonesia sebagai pusatnya.

Apabila dibuat ikhtisarnya, maka landasan pengembangan sistem pertahanan di laut adalah Azas Nusantara, sedangkan obyek yang harus dipertahankan adalah Benua Nusantara dengan segala isinya. Adapun tuntutan yang harus dipegang dalam aktualisasinya adalah Doktrin Kawasan Nusantara, sedangkan pendekatan untuk pembangunan kekuatannya adalah Doktrin Ketahanan Nasional. Struktur sistem pertahanan di

laut, terutama sistem pendukungnya, dijiwai oleh sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

Interaksi Antarunsur Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional adalah kekuatan nasional yang wujudnya berupa keuletan, ketangguhan dan kemampuan bangsa dan negara baik untuk menghadapi ancaman maupun untuk mencapai tujuan nasional. Keuletan mencerminkan daya tahan, ketabahan dan keberanian menghadapi bahaya. Ketangguhan mencerminkan daya juang, kehandalan dan keunggulan menghadapi lawan. Kemampuan adalah kesanggupan untuk mengatasi setiap rintangan dan mencapai tujuan. Rangkaian daya tahan, daya juang dan kesanggupan mewujudkan suatu daya tangkal luar biasa yang menjadikan bangsa dan negara Indonesia kekuatan yang disegani di Asia Tenggara.

Ketahanan nasional merupakan kekuatan nasional yang bulat dan padu sebagai hasil interaksi antara unsur-unsurnya, yaitu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Apabila unsur-unsur geografi, demografi dan kekayaan alam disatukan sebagai unsur lingkungan fisik, dan unsur ideologi diasumsikan ada dalam tiap unsur yang lain, maka unsur-unsur ketahanan nasional menjadi hanya lima,

yaitu lingkungan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kelima unsur ini dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara membentuk suatu satuan matriks dengan kelima unsur itu sebagai variabel-variabel yang sangat dinamis dan berinteraksi secara intensif dengan saling ketergantungan yang tinggi.

Variabel-variabel itu dapat membentuk matriks-matriks interaksi unsur-unsur ketahanan nasional sesuai kebutuhan, dengan membuat variabel-variabel itu sebagai kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan untuk mendukung tujuan tertentu. Rumusan kepentingan tiap

unsur terhadap unsur yang lain untuk tujuan mewujudkan stabilitas nasional atau keamanan nasional atau kekuatan laut nasional akan berbeda-beda. Dari matriks silang kepentingan itu akan diperoleh gambaran yang menyeluruh, sistemik dan terpadu untuk tiap tujuan, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan itu.

Matriks interaksi unsur-unsur ketahanan nasional untuk mewujudkan kekuatan laut nasional (*national sea power*) dengan variabel-variabel lingkungan, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.

Matriks interaksi unsur-unsur ketahanan nasional untuk mewujudkan kekuatan laut nasional

| | Lingkungan | Politik | Ekonomi | Sosbud | Hankam |
|------------|---|---|---|--|--|
| Lingkungan | | Kepentingan lingkungan terhadap politik | Kepentingan lingkungan terhadap ekonomi | Kepentingan lingkungan terhadap sosbud | Kepentingan lingkungan terhadap hankam |
| Politik | Kepentingan politik terhadap lingkungan | | Kepentingan politik terhadap ekonomi | Kepentingan politik terhadap sosbud | Kepentingan politik terhadap hankam |
| Ekonomi | Kepentingan ekonomi terhadap lingkungan | Kepentingan ekonomi terhadap politik | | Kepentingan ekonomi terhadap sosbud | Kepentingan ekonomi terhadap hankam |
| Sosbud | Kepentingan sosbud terhadap lingkungan | Kepentingan sosbud terhadap politik | Kepentingan sosbud terhadap ekonomi | | Kepentingan sosbud terhadap hankam |
| Hankam | Kepentingan hankam terhadap lingkungan | Kepentingan hankam terhadap politik | Kepentingan hankam terhadap ekonomi | Kepentingan hankam terhadap sosbud | |

1. Lingkungan

a. Kepentingan lingkungan terhadap politik :

- 1) Adanya konsistensi kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan, terutama lingkungan pantai dan laut.
- 2) Adanya pengaturan tata ruang untuk seluruh wilayah, terutama untuk daerah pantai, secara lintas sektor.
- 3) Adanya kepastian garis batas negara, terutama garis batas laut.

b. Kepentingan lingkungan terhadap ekonomi :

- 1) Adanya jaminan perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan alam dalam pemanfaatan kekayaan alam, terutama kekayaan alam laut dan yang berdampak terhadap lingkungan laut.
- 2) Adanya pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh pulau, terutama daerah-daerah pantai dan khususnya desa-desa nelayan.
- 3) Adanya pemerataan pembangunan ekonomi secara spasial, dengan memanfaatkan karakteristik lingkungan masing-masing untuk menghasilkan keunggulan daerah.

c. Kepentingan lingkungan terhadap sosial budaya:

- 1) Adanya pemerataan distri-

busi penduduk dan pembangunan sosial budaya secara spasial, terutama untuk daerah-daerah pantai luar dan perbatasan.

- 2) Adanya dorongan untuk mempelajari dan meneliti kekayaan laut serta mencari kehidupan di laut.
- 3) Adanya dorongan untuk mengembangkan tradisi dan budaya kelautan.

d. Kepentingan lingkungan terhadap pertahanan keamanan:

- 1) Adanya kemampuan untuk menjamin keutuhan, keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi, terutama di wilayah laut.
- 2) Adanya sistem pertahanan keamanan yang mencakup seluruh wilayah darat, laut dan udara secara terpadu dan proporsional, dan menjangkau sampai batas luar ZEE.
- 3) Adanya jaminan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan.

2. Politik

a. Kepentingan politik terhadap lingkungan:

- 1) Adanya penguasaan politik terhadap seluruh wilayah negara secara merata sampai ke garis batas terluar, termasuk wilayah laut dan garis batas laut.
- 2) Adanya konsepsi geopoliti-

tik dan geostrategi yang didukung konfigurasi dan kondisi lingkungan yang serba laut.

- 3) Adanya konsistensi dalam menegakkan tata ruang nasional, terutama untuk daerah pantai dan laut.

b. Kepentingan politik terhadap ekonomi:

- 1) Adanya dana dan infrastruktur yang memadai untuk pembangunan kekuatan laut nasional.
- 2) Adanya sistem distribusi dan transportasi laut yang menjamin pemerataan pembangunan seluruh pulau.
- 3) Adanya perdagangan lewat laut yang pesat, baik antar-pulau maupun ke luar negeri

c. Kepentingan politik terhadap sosial budaya :

- 1) Adanya penghayatan dan pengamalan yang merata atas Doktrin Wawasan Nusantara, Doktrin Ketahanan Nasional dan Doktrin Pertahanan Keamanan Negara.
- 2) Adanya kesadaran bela negara dan rasa kebangsaan yang luas di kalangan warga negara.
- 3) Adanya kesadaran bahwa kejayaan bangsa dan negara ada di laut.

d. Kepentingan politik terhadap

pertahanan keamanan :

- 1) Adanya sistem, kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan di laut yang dapat diandalkan.
- 2) Adanya jaminan tegaknya kedaulatan dan hukum di seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional, terutama di laut sampai batas luar ZEE.
- 3) Adanya jaminan keamanan dan stabilitas nasional di seluruh wilayah negara.

3. Ekonomi

a. Kepentingan ekonomi terhadap lingkungan :

- 1) Adanya kesempatan yang sama untuk menggunakan kekayaan lingkungan, terutama lingkungan laut, bagi pembangunan ekonomi.
- 2) Adanya infrastruktur yang memadai untuk menggunakan kekayaan lingkungan, terutama lingkungan laut, bagi pembangunan ekonomi.
- 3) Adanya sistem yang melindungi pelestarian dan regenerasi lingkungan, termasuk lingkungan laut.

b. Kepentingan ekonomi terhadap politik :

- 1) Adanya dorongan dan kemudahan bagi usaha-usaha baik eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di laut maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan laut.

- 2) Adanya pusat koordinasi dan sinergi lintas bidang dan sektor dalam pendayagunaan kekayaan laut.
 - 3) Adanya kemudahan usaha dan penerapan prinsip kabotase dalam perhubungan laut, terutama untuk dalam negeri.
- c. Kepentingan ekonomi terhadap sosial budaya:
- 1) Adanya cukup banyak lembaga pendidikan kelautan dalam semua tingkat dan disiplin ilmu untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelaut, nelayan, petani, pengusaha, teknokrat, teknolog dan ilmuwan kelautan.
 - 2) Adanya cukup data dan informasi tentang laut Nusantara dan sekitarnya, termasuk tenaga kerja dan pakar kelautan.
 - 3) Adanya kegemaran untuk ke laut, baik untuk bekerja maupun untuk rekreasi, serta pemanfaatan hasil laut bagi kehidupan.
- d. Kepentingan ekonomi terhadap pertahanan keamanan:
- 1) Adanya jaminan keamanan usaha di laut.
 - 2) Adanya perencanaan jangka panjang pembangunan kekuatan pertahanan keamanan, khususnya kekuatan pertahanan di laut, yang dapat didukung oleh sektor-sektor ekonomi.
- 3) Adanya perencanaan mobilisasi pertahanan keamanan, khususnya untuk pertahanan di laut, yang melibatkan sektor-sektor ekonomi, sehingga dapat diantisipasi dan disiapkan secara dini.
4. Sosial Budaya
- a. Kepentingan sosial budaya terhadap lingkungan:
- 1) Adanya sistem pelestarian lingkungan yang mendukung pelestarian nilai-nilai luhur sosial budaya bangsa, terutama yang berkaitan dengan laut.
 - 2) Adanya upaya-upaya yang menjamin dan mempercepat regenerasi kekayaan alam terbarukan, di samping upaya-upaya untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan, sehingga terpeliharanya daya dukung lingkungan, terutama lingkungan laut, untuk menghidupi penduduk yang terus meningkat.
 - 3) Adanya rasa cinta alam, terutama alam laut, yang merata di seluruh wilayah, baik wilayah pantai maupun wilayah pedalaman.
5. Pertahanan Keamanan
- a. Kepentingan pertahanan keamanan terhadap lingkungan:
- 1) Adanya batas wilayah

- negara, peta wilayah darat dan laut, peta dasar laut dan karakteristik air laut, serta tata ruang yang jelas dan berkekuatan hukum.
- 2) Adanya pencadangan bagi kepentingan pertahanan keamanan terhadap daerah-daerah dan lokasi-lokasi yang mempunyai nilai strategi militer, terutama di daerah pantai.
 - 3) Adanya penelitian, eksplorasi dan evaluasi terhadap seluruh kekayaan alam dalam wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional terutama terhadap kekayaan alam laut.
- b. Kepentingan pertahanan keamanan terhadap politik:
- 1) Adanya strategi nasional yang mendukung pembangunan sistem, kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan di laut.
 - 2) Adanya kepastian hukum terhadap penentuan garis batas wilayah negara, baik teritorial maupun kekayaan alam.
 - 3) Adanya kepastian hukum tentang penjabaran hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip hukum Negara Kepulauan sesuai KHL 1982, khususnya yang berkaitan dengan alur laut kepulauan.
- c. Kepentingan pertahanan kea-
- manan terhadap ekonomi:
- 1) Adanya industri kapal, peralatan, perbekalan dan jasa kelautan yang dapat mendukung upaya pertahanan keamanan di laut.
 - 2) Adanya sistem perhubungan laut dan perikanan laut yang tangguh, baik kapal, anak buah, pangkalan dan fasilitas darat lainnya, yang menjangkau secara tetap dan teratur seluruh pulau di Indonesia.
 - 3) Adanya dukungan anggaran yang cukup bagi pemeliharaan dan pembangunan sistem, kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan, khususnya untuk kekuatan di laut.
- d. Kepentingan pertahanan keamanan terhadap sosial budaya:
- 1) Adanya penghayatan yang merata tentang konsepsi-konsepsi pertahanan keamanan di laut.
 - 2) Adanya penguasaan terhadap ilmu dan teknologi kelautan, terutama yang dapat mendukung upaya pertahanan keamanan di laut.
 - 3) Adanya keyakinan akan kejayaan dan kemenangan bangsa di laut.
- Demikian tentang matriks interaksi unsur-unsur ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan

sistem, kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan di laut. Matriks ini akan merupakan landasan kerjasama dan sinergi upaya yang kuat bagi seluruh unsur, bidang dan sektor, juga untuk merumuskan strategi pertahanan laut.

Permasalahan dalam Strategi Ketahanan Laut

Strategi perang di laut, baik dalam rangka penyerangan maupun pertahanan, dicapai melalui penguasaan atas laut secara menyeluruh (*command of the sea*) atas secara berkala (*disputing the sea*). Dalam rangka penyerangan maka penguasaan atas laut itu ditegakkan di bagian-bagian laut yang menjadi jalan masuk ke negara yang akan diserang, sedangkan dalam rangka pertahanan maka penguasaan atas laut itu ditegakkan di laut yang mengelilingi negara sendiri.

Penguasaan atas laut bagi negara yang wilayahnya dikelilingi oleh laut, apalagi bagi negara kepulauan yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas laut, merupakan suatu kebutuhan yang bersifat mutlak, suatu *conditio sine qua non*, suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Penguasaan atas laut itu tidak hanya dibutuhkan di masa perang saja pada saat ada rencana perang untuk menyerang, tetapi sepanjang waktu, baik di masa perang maupun di masa damai, karena pertahanan merupakan keadaan siaga yang diperlukan sepanjang waktu.

Penguasaan atas laut dapat dite-

gakkan melalui kehadiran kekuatan laut yang besar dalam satu konsentrasi kekuatan, tetapi juga dapat ditempuh melalui kehadiran kekuatan laut yang tidak terlalu besar dan tersusun dalam satuan-satuan kecil yang bergerak mobil dari satu bagian ke bagian yang lain dalam siaga *fleet in being*.

Untuk tujuan pertahanan, penguasaan atas laut itu ditegakkan di laut bebas dekat perbatasan ZEE sendiri dan di semua pintu masuk, dengan dukungan logistik di pangkalan pangkalan terdekat sebagai lini depan yang selanjutnya didukung oleh pangkalan-pangkalan yang lebih besar di lini dalam. Laut bebas dekat perbatasan ZEE merupakan serambi depan yang harus dijamin keamanannya sepanjang waktu.

Bagi Indonesia yang bangun wilayahnya merupakan Benua Nusantara, serambi depan yang harus dijaga itu merupakan lingkaran lonjong yang di utara dan timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik, dan yang di selatan dan barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Pintu-pintu masuk ke Benua Nusantara merupakan ujung-ujung selat dan laut seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Natuna, Laut Sulawesi, laut Maluku, Laut Sawu, Laut Timor dan Laut Arafuru. Untuk tugas-tugas berjaga di laut itu diperlukan armada kapal-kapal perang yang laik samudera (*ocean going fleet*), baik yang atas air maupun yang bawah air.

Penguasaan atas laut di dalam Benua Nusantara sebagai halaman dalam dilaksanakan oleh armada kapal-kapal patroli, yang karena sifat lautnya harus pula mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan pengejaran yang tidak terputus (*hot pursue*) melintasi laut bebas sampai ke batas laut teritorial negara lain. Tujuan penguasaan laut dalam rangka pertahanan laut Benua Nusantara itu adalah untuk ikut menjamin keamanan dan stabilitas nasional secara menyeluruh. Pertahanan laut, bahkan juga perang laut memang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari strategi nasional. Dengan penguasaan atas laut musuh dari luar tidak dapat melakukan invasi atau infiltrasi melalui laut, sehingga keamanan dan ketuhan seluruh wilayah negara, demikian pula stabilitas nasional akan terpelihara. Aparat negara di darat yang selanjutnya akan menegakkan keamanan dan stabilitas nasional.

Untuk mewujudkan, mempertahankan dan memelihara keamanan dan stabilitas nasional diperlukan koordinasi dan sinergi yang padu antara semua unsur kekuatan nasional, baik aparat pemerintahan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat. Matriks interaksi unsur-unsur ketahanan nasional akan merupakan landasan kerjasama dan sinergi yang ideal.

Posisi benua Nusantara di antara dua samudera dan dua benua yang sangat dinamik, menjadikan keaman-

an dan stabilitas nasionalnya rawan terhadap perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di lingkungan sekelilingnya. Seluruh kawasan di sekeliling Benua Nusantara, baik kawasan dalam Asia Tenggara maupun kawasan luar Asia Pasifik dan Asia Afrika, perlu untuk senantiasa terpelihara keamanan dan stabilitasnya secara regional. Kawasan-kawasan itu akan menjadi peneguh keamanan dan stabilitas nasional benua Nusantara.

Penguasaan atas laut seluruh serambi luar benua Nusantara selain untuk menjamin ketuhan Benua Nusantara, juga untuk ikut serta menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan-kawasan laut Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Afrika. Penghadiran kekuatan laut dalam rangka *naval presence* dan *naval suasion* adalah untuk meningkatkan saling percaya (*confidence building measures*) dengan landasan prinsip-prinsip ZOPFAN dan *Bali Concord* serta memanfaatkan lembaga ASEAN Regional Forum (ARF) dengan nitra dialognya. Penghadiran kekuatan laut secara cukup dan berlanjut di serambi luar dan halaman dalam Benua Nusantara memerlukan dukungan seluruh unsur kekuatan nasional secara berlanjut pula, yang tidak lain daripada pendayagunaan ketahanan nasional secara optimal.

Kesimpulan

Kepulauan Indonesia dengan landasan Azas Nusantara diimajinasikan

sebagai Benua Nusantara yang selanjutnya dibangun secara terpadu sesuai Doktrin Wawasan Nusantara dan Doktrin Ketahanan Nasional, serta dipertahankan keutuhannya sesuai Doktrin Pertahanan Keamanan Negara. Perkembangan dunia di masa datang akan semakin meningkatkan peranan laut, baik fungsi maupun kekayaan alamnya, sehingga penyediaan kekuatan laut secara cukup untuk menjamin keutuhan Benua Nusantara merupakan kepentingan yang tidak dapat dihindari. Bagi Benua Nusantara kekuatan laut merupakan inti kekuatan nasionalnya, yang pembangunannya memerlukan koordinasi, kerjasama dan sinergi yang erat dari seluruh unsur kekuatan nasional. Interaksi unsur-unsur kekuatan nasional secara terpadu akan mewujudkan ketahanan nasional yang diperlukan sebagai landasan untuk membangun kekuatan laut nasional.

Strategi pertahanan laut merupakan bagian dari strategi nasional. Sasaran utama strategi pertahanan laut adalah menegakkan penguasaan atas laut untuk ikut menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Penguasaan atas laut di sekeliling Benua Nusantara sekaligus merupakan kehadiran kekuatan laut (*naval presence* atau *naval suasion*) di kawasan laut Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Afrika untuk ikut memelihara keamanan dan stabilitas regional yang menjadi peneguh keamanan dan stabilitas nasional. Secara regional diciptakan saling percaya dan kerjasama keaman-

an secara bilateral dan multilateral melalui prinsip-prinsip ZOP (Zone of Peace) dan Bali Concord serta memanfaatkan rana ARF dengan mitra dalam Pertahanan laut di sekeliling Benua Nusantara adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional sekaligus mendaya gunakannya.